

Judul : Rujukan berjenjang BPJS dihapus SDM & Fasilitas RS wajib ditingkatkan
Tanggal : Jumat, 28 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Rujukan Berjenjang BPJS Dihapus SDM & Fasilitas RS Wajib Ditingkatkan



Irma Suryani Chaniago

LEGISLATOR Senayan meminta perombakan menyeluruh terhadap sistem rujukan berjenjang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Mekanisme rujukan berjenjang dinilai boros anggaran dan menjadi salah satu penyebab defisit BPJS Kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago mengatakan pasien dengan kondisi darurat kini bisa langsung dirujuk ke rumah sakit (RS) kelas A. Kebijakan itu menguntungkan karena pasien bisa segera mendapat tindakan.

Selain itu, Irma mendorong Pemerintah meningkatkan kapasitas seluruh RS di Indonesia agar tiap fasilitas mampu menangani kasus darurat secara mandiri dan tidak menjadi beban berlebih bagi RS rujukan.

"Kenapa tidak semua rumah sakit disiapkan SDM-nya, disiapkan alkesnya. Jadi semua rumah sakit punya fasilitas yang sama minimal dengan rumah sakit kelas A," ujar Irma dalam Rapat Panja JKN Komisi IX DPR dengan Kementerian Kesehatan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Ia mengingatkan, jika semua pasien diarahkan langsung ke RS kelas A tanpa pemerataan fasilitas, penumpukan pasien tidak bisa dihindari. Menurutnya, kondisi itu bisa menimbulkan kegaduhan baru dalam

layanan kesehatan.

Anggota Komisi IX DPR Asep Romy Romaya menambahkan, kebijakan Pemerintah yang akan mengubah sistem rujukan peserta BPJS Kesehatan mulai awal 2026 merupakan langkah baik untuk membantu peserta. Namun, fasilitas kesehatan dan tenaga medis harus benar-benar disiapkan agar pelayanan tidak tersendat.

"Pemerintah harus memastikan infrastruktur pelayanan kesehatan benar-benar siap, mulai dari fasilitas hingga ketersediaan tenaga medis," kata legislator Fraksi PKB itu.

Ia menegaskan, kesiapan fasilitas RS menjadi faktor penting agar tidak terjadi hambatan layanan akibat keterbatasan ruang rawat atau minimnya tenaga kesehatan. Jangan sampai muncul penumpukan pasien karena RS tidak mampu memberi layanan optimal.

Asep juga meminta Pemerintah memastikan kebijakan ini diterapkan merata di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal dan kawasan Indonesia Timur.

"Di daerah yang jauh dari pusat kota pun pasien BPJS Kesehatan harus mendapatkan pelayanan yang memadai tanpa pengecualian," ingatnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan beban JKN yang dikelola BPJS Kesehatan selalu lebih besar dibanding pendapatannya sejak 2014. Jika pun sempat mencatat hasil positif, hal itu disebabkan kenaikan iuran.

BPJS, kata dia, pernah mencatat surplus pada 2019 dan pada tahun-tahun pandemi karena pemanfaatan layanan menurun. Namun tren defisit kembali muncul sejak 2023 hingga 2025. Menurutnya, keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan harus dijaga. ■ PVB